

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cetakan ke-4, Kencana, Jakarta.
- Amrullah, M. Arief, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bayumedia, Malang.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Danil, Elwi, 2012, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, Muladi, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Djaja, Ermansyah, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E.PH. Sutorius, D. Schaffmeister, N. Keijzer, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Farid, Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ginting, Jamin, 2010, *Kapita Selekta Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia: Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta

Hamzah, Andi, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.

-----, 2001, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta

-----, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S, Saldi Isra, 2009, *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (Editor), Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, PT Gramedia Pustaka Umum Jakarta.

-----, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta.

Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia publishing, Malang.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014, *Anotasi Delik Korupsi dan Delik Lainnya yang Berkaitan dengan Delik Korupsi pada RUU KUHP*, Jakarta.

Kaligis, OC (i), 2010, *Korupsi Bibit&Chandra, Indonesia Againts Injustice*, Jakarta,

Lamintang, P.A F dan C Dijsman Samosir (ii), 1979. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain, Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung.

- Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong Lexy J., 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya Cet.1*, Alumni, Bandung.
- Nurdjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rosikah, Hatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suyatno, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta.
- Suradi, 2006, *Korupsi dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Gava Media, Yogyakarta.
- Syarif Laode M, dan Didik E. Purwoleksono, 2016, *Hukum Anti Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Tan, Boon Gin, 2007, *The Law on Corruption in Singapore: Cases and Materials*, Academy Publishing, Singapura.

Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, UPT Penerbitan UMM, Malang.

Trandra, Riawan, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, *Legislative Guide for the implementation of the United Nation Conventiom Againts Corruption*, United Nation, New York, Amerika Serikat.

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

B. ARTIKEL JURNAL

Chaikin, David, 2008, "Commercial Corruption and Money Laundering: a Preliminary Analysis", *Journal of Financial Crime*, Vol. 15 Issue: 3, pp.269-281

Hairi, Prianter Jaya, "Urgensi Pengaturan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta", *Info Singkat*, Vol. 10, No. 24, Desember 2018.

Marbun, Andreas Nathaniel, *Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?*, Jurnal Integritas, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Volume 03, Nomor 1, 2017.

Prahassacitta, Vidya, "Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan", *Jurnal Hukum&Pembangunan*, Vol 47, No. 4, 2017.

Siswanto, Dadang, "Korupsi Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir", *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 42. Nomor 1. 2013.

C. HASIL PENELITIAN/TUGAS AKHIR

Anwar, Misbahul, 2018, Kebijakan Hukum Pidana Terkait Penyuaapan di Sektor Swasta di Indonesia, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Univeristas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sianturi, Tio Horas Soaduon, Kriminalisasi *Trading in Influence* dalam *United Nations Convention Againts Corruption* Terhadap Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia, *Penulisan Hukum*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Vinandita Nur Ismoyowati, 2019, Kebijakan Formulasi Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2985.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Covention Againts Corruption, 2003*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.

United Nations Covention Againts Corruption, 2003 (UNCAC), General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi).

OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Official in International Business Transactions.

Singapura *Prevention of Corruption Act, 1993.*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 003/PUU-IV/2006 dalam Perkara Pengujian Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam Perkara Pengujian Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. ARTIKEL MAJALAH/KORAN

Eddy O.S Hiariej, “DPR Versus KPK”, *Kompas*, 8 Mei 2017.

F. INTERNET

Daniel Lucien Buhr and Marc Henzelin, “Anti-Corruption Regulation”, <https://gettingthedealthrough.com/area/2/jurisdiction/29/anti-corruption-regulation-switzerland/>, diakses 13 Maret 2019.

Dewi Nurita, “KPK: Penindakan Korupsi Sektor Swasta Bisa Tingkatkan Investasi”, <https://nasional.tempo.co/read/1063129/kpk-penindakan-korupsi-sektor-swasta-bisa-tingkatkan-investasi/full&view=ok>, diakses 27 Februari 2019.

FNH, “Sekali Lagi, Pasal 2 dan Pasal 3 TIPIKOR Ancaman Hukuman termasuk yang diperdebatkan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5719ec2e3894a/sekali-lagi--pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor/>, diakses 28 Februari 2019.

Glery Lazuardi, “Keberadaan MLA Indonesia-Swiss Dapat Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Dalam Negeri”, <http://www.tribunnews.com/nasional/2019/02/17/keberadaan-mla-indonesia-swiss-dapat-mencegah-tindak-pidana-pencucian-uang-di-dalam-negeri>, diakses 17 Februari 2019.

Indonesia Corruption Watch, “Korupsi di Sektor Swasta”, <https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-di-sektor-swasta-0>, diakses 20 November 2018

Iron Sarira, 2015, “Tindak pidana penggelapan Di Perusahaan Swasta dan Lembaga Pemerintah”, <http://business-law.binus.ac.id/2015/09/19/administrative-penalty-dalam-hubunganketenagakerjaan/>, diakses 28 Maret 2019.

Kristian Erdianto, “Pemerintah Hilangkan Pasal Terkait Korupsi di Sektor Swasta dalam RKUHP”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/04/15253261/pemerintah-hilangkan-pasal-terkait-korupsi-di-sektor-swasta-dalam-rkuhp> diakses 9 Oktober 2018.

M Dani Pratama Huzani, “Memahami Kembali Delik Formil Pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58b107c37432b/memahami-kembali-delik-formil-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor>, diakses 28 Februari 2019.

Nia Maryam Doraq, “Komosi Pemberantasan Korupsi di Singapura/*Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB)”, <https://www.kompasiana.com/sitim4ryam/550e3580813311b72dbc610c/komisi-pemberantasan-korupsi-singapura-cpibcorrupt-practices-investigation-bureau>, diakses 29 Maret 2019.

Nza, “Pelaku Tertinggi Korupsi dilakukan Sektor Swasta”, <https://www.koran-jakarta.com/pelaku-tertinggi-korupsi-dilakukan-sektor-swasta/>, diakses 2 Oktober 2018.

Tempo, “Eksklusif: 2125 Dokter Diduga Terima Suap Obat Rp 131 Miliar”, <https://nasional.tempo.co/read/715195/eksklusif-2-125-dokter-diduga-terima-suap-obat-rp-131-m>, diakses 21 Oktober 2018.

Transparency International, “Corruption Perceptions Indeks 2018”, <https://www.transparency.org/cpi2018>, diakses 4 Maret 2019.

Yoga Sukmana, “Korupsi di Sektor Swasta Lebih Gila”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/07304001/korupsi-di-sektor-swasta-lebih-gila>, diakses 2 Oktober 2018.